**ANALISIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA**

**DI DESA BANGUNREJO KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG**

**KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

**Nur Muslich[[1]](#footnote-1)**

**ABSTRAK**

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa disahkan dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), tanggal 18 Desember 2013, setelah menempuh perjalanan panjang selama tujuh tahun (2007-2013). Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menjadi bukti ketegasan komitmen Pemerintah Indonesia dan anggota DPR-RI untuk melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi lebih kuat, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kokoh dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Kewenangan desa untuk mengatur dan mengurus urusan masyarakat secara mandiri mensyaratkan adanya manusia-manusia handal dan mumpuni sebagai pengelola desa sebagai *self governing community* (komunitas yang mengelola pemerintahannya secara mandiri). Perencanaan Partisipasi masyarakat sebagai masukan dalam perencanaan pembangunan diharapkan dapat meningkatkan usaha perbaiakan kondisi dan taraf hidup masyarakat desa. Dengan partisipasi masyarakat desa kemampuan masyarakat desa untuk berkembang secara mandiri akan lebih cepat. Keikutsertaan masyarakat untuk berpartisipasi merupakan tolak ukur keberhasilan awal proses perencanaan partisipatif. Dan ini harus senantiasa di tumbuh kembangkan di tingkat desa.

Di masa depan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa memiliki sumber dana yang cukup besar untuk kemandirian masyarakat desa. Dana tersebut berasal dari tujuh sumber pendapatan yakni : APBN, Alokasi Dana Desa (ADD), bagi hasil, pajak dan retribusi, bantuan keuangan dari Provinsi/ Kabupaten dan Kota, hibah yang sah dan tidak mengikat.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa tidak hanya membawa sumber penandaan pembangunan bagi desa, namun juga memberi lensa baru pada masyarakat untuk mentranformasi wajah desa. Melalui pemberdayaan masyarakat desa yang diharapkan mampu membawa perubahan nyata sehingga harkat dan martabat mereka diperhitungkan.

Pemberdayaan masyarakat merupakan pendekatan yang memperlihatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat dengan sasaran seluruh lapisan masyarakat desa, pemandirian sehingga mampu membangkitkan kemampuan *Self-help* (membantu diri sendiri) untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa yang mengacu pada cara berfikir, bersikap, berperilaku untuk maju. Peran desa terpinggirkan sehingga prakarsa desa menggerakkan pembangunan menjadi lemah. Konsep “Desa Membangun” memastikan bahwa desa adalah subyek utama pembangunan desa. Konsep ini sangat relevan dengan kewenangan lokal berskala desa oleh pemerintah desa.

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa salah satu strategi penting bagi rumah tangga desa yaitu untuk mendapatkan dan meningkatkan penghasilan. Terlebih pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas warga desa, serta menanggulangi kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat desa.

**Kata Kunci: pemberdayaan, masyarakat, pembangunan**

1. **PENDAHULUAN**

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa disahkan dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), tanggal 18 Desember 2013, setelah menempuh perjalanan panjang selama tujuh tahun (2007-2013). Seluruh komponen bangsa menyambutnya sebagai kemenangan besar. Sebab, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menjadi bukti ketegasan komitmen Pemerintah Indonesia dan anggota DPR-RI untuk melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi lebih kuat, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kokoh dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Kewenangan desa untuk mengatur dan mengurus urusan masyarakat secara mandiri mensyaratkan adanya manusia-manusia handal dan mumpuni sebagai pengelola desa sebagai *self governing community* (komunitas yang mengelola pemerintahannya secara mandiri).

Perencanaan Partisipasi masyarakat sebagai masukan dalam perencanaan pembangunan diharapkan dapat meningkatkan usaha perbaiakan kondisi dan taraf hidup masyarakat desa. Dengan partisipasi masyarakat desa kemampuan masyarakat desa untuk berkembang secara mandiri akan lebih cepat. Keikutsertaan masyarakat untuk berpartisipasi merupakan tolak ukur keberhasilan awal proses perencanaan partisipatif. Dan ini harus senantiasa di tumbuh kembangkan di tingkat desa.

Kendala yang dihadapi dalam pemberdayaan masayarakat dalam pembangunan Desa di Desa Bangunrejo Kecamatan Tenggarong Seberang yaitu antara lain:

1. Kurangnya dukungan pemerintah kabupaten dalam pembinaan aparatur desa, berupa bimbingan teknis terkait perencanaan pembangunan desa.
2. Belum optimalnya peran dan fungsi aparatur desa dalam mengawal pembangunan di desa, karna keterbatasan sumber daya manusia yang mengerti betul tentang proses perencanaan partisipatif dalam rangka mengagas masa depan desa.
3. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengikuti proses perencanaan pembangunan partisipasi masyarakat dalam pemberian usulan kegiatan yang merupakan kebutuhan masyarakat atau dalam perencanaan. Masyarakat masih berorientasi pada kegiatan pembangunan sarana dan prasaran belum menyentuh kepada peningkatan kapasitas masyarakat (pelatihan masyarakat).
4. Dalam proses perencanaan pembangunan partisipatif keterlibatan masyarakat miskin sangat minim. Kecenderungan masyarakat kalangan menengah yang menguasai setiap pertemuan . Akan tetapi partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa belum maksimal karena hampir sebagian masyarakat kurang memiliki pengetahuan sehingga menjadi faktor penghabat dalam perencanaan pembangunan desa, dan yang datang mengikuti perencanaan pembangunan hanyalah sebagian masyarakat yang punya pemahaman yang lebih.

Pemberdayaan masyarakat merupakan pendekatan yang memperlihatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat dengan sasaran seluruh lapisan masyarakat desa, pemandirian sehingga mampu membangkitkan kemampuan *Self-help* (membantu diri sendiri) untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa yang mengacu pada cara berfikir, bersikap, berperilaku untuk maju. Peran desa terpinggirkan sehingga prakarsa desa menggerakkan pembangunan menjadi lemah. Konsep “Desa Membangun” memastikan bahwa desa adalah subyek utama pembangunan desa. Konsep ini sangat relevan dengan kewenangan lokal berskala desa oleh pemerintah desa.

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa salah satu strategi penting bagi rumah tangga desa yaitu untuk mendapatkan dan meningkatkan penghasilan. Terlebih pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas warga desa, serta menanggulangi kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat desa. Amanat Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yaitu membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya, mengembangkan sumber pendapatan desa dan perwujudan pembangunan secara partisipatif, mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dikelola dengan semangat kekeluargaan dan gotong royong (Wahyu Widodo, 2015 : 817-818).

**II. PERMASALAHAN**

1. Bagaimana Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Bangunrejo Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara?
2. Faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat dalam Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Desa di Desa Bangunrejo Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara?
3. **KERANGKA DASAR TEORI**

**Sumber Daya Manusia**

Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) menurut Mathis dan Jackson (2006: 3) adalah rancangan sistem-sistem formal dalam sebuah organisasi untuk memastikan penggunaan bakat manusia secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan organisasi.

Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) menurut Fustino Cardoso Gomes (2002: 3), memberikan pengartian yang berbeda bahwa MSDM adalah : Suatu gerakan pengakuan terhadap pentingnya unsur manusia sebagai sumber daya yang cukup potensial yang perlu dikembangkan sedemikian rupa sehingga mampu memberikan kontribusi yang maksimal bagi organisasi dan bagi pengembangan dirinya.

**Konsep Pemberdayaan**

Menurut Sulistiyani (2004 : 77) secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata dasar “daya” yang berarti kekuatan atau kemampuan. Bertolak dari pengertian tersebut, maka pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya atau proses pemberian daya (kekuatan/kemampuan) kepada pihak yang belum berdaya.

Menurut Soetomo (2011 : 25) masyarakat adalah sekumpulan orang yang saling berinteraksi secara kontinyu, sehingga terdapat relasi sosial yang terpola, terorganisasi.

Menurut Suhendra (2006:2) Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya gerakan terus menerus untuk menghasilkan suatu kemandirian (*selfpropelled development*).

Adisasmita (2006:2) Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya masyarakat pedesaan yang lebih efektif dan efesien, seperti :

1. Aspek masukan atau input (SDM, dana, peralatan sarana, data rencana,serta teknologi);
2. Aspek proses (pelaksanaan, monitoring dan pengawasan);
3. Aspek keluaran dan out put (pencapaian sasaran, efektivitas dan efisiensi).

**Pemberdayaan Masyarakat**

Menurut Adger (2003:9) *The Webster & Oxford English Dictionari* dalam pokok-pokok penjelasan mengenai kebijakan pemberdayaan masyarakat dalam rangka kemandirian memberikan dua arti yang berbeda mengenai pemberdayaan sebagai:

1. Memberikan kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau menegakkan otoritas kepihak lain sedangkan,
2. Diartikan sebagai upaya untuk memberikan kemampuan dan keberdayaan.
3. Indikator Pemberdayaan Masyarakat

Schuler, Hashemi dan Riley dalam Edi Suharto (2005:63-64) mengembangkan delapan indikator pemberdayaan antara lain sebagai berikut :

1. Kebebasan mobilitas*,* Kemampuan individu untuk pergi keluar rumah atau tempat tinggalnya, seperti kepasar, fasilitas medis, bioskop, rumah ibadah, kerumah tetangga. Tingkat mobilitas ini dianggap tinggi jika individu mampu pergi sendirian.
2. Kemampuan membeli komoditas kecil, kemampuan individu untuk membeli barang-barang kebutuhan keluarga sehari - hari (beras, minyak tanah, minyak goring, bumbu); kebutuhan dirinya. Individu dianggap mampu melakukan kegiatan ini terutama jika dapat membuat keputusan sendiri tanpa meminta ijin pasangannya terlebih dapat membeli barang-barang tersebut dengan menggunakan uangnya sendiri.
3. Kemampuan membeli Komoditas besar*,* kemampuan individu untuk membeli barang.

**Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat**

Pelaksanaan proses dan pencapaian tujuan pemberdayaan diatas di capai melalui penerapan pendekatan pemberdayaan yang dapat disingkat menjadi 5P, yaitu: pemukiman, penguatan perlindungan, penyokongan dan pemeliharaan (Suharto, 1997:67-68) :

1. Pemukiman : menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural dan struktural yang menghambat .
2. Penguatan : memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan - kebutuhannya.
3. Perlindungan : melindungi masyarakat terutama kelompok - kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang (apa lagi tidak sehat) antara yang kuat dan yang lemah.
4. Penyokongan : memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya.
5. Pemeliharaan : memelihara kondisi yang konduktif agar atap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara pembagi kelompok dalam masyarakat.

**Pengertian Masyarakat**

Menurut Koenjaraningrat (2012: 122) masyarakat merupakan kesatuan hidup manusia yang berinteraksi sesuai dengan sistem adat-istiadat tertentu yang sifatnya berkesinambungan dan terikat oleh suatu rasa identitas bersama.

Menurut J.L. Gilin dan J.P. Gilin dalam Syani (2012:32), masyarakat merupakan kelompok manusia yang terbesar dan mempunyai kebiasaan, persatuan, sikap dan tradisi yang sama.

**Teori Pembangunan**

Menurut Siagian (2005:4) Pembangunan sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa.

Ginanjar Kartasasmita (dalam Riyadi dan Bratakusumah 2004:4) Pembangunan adalah sebagai suatu proses perubahan kea rah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara berencana”.

1. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pembangunan*

Kemudian dalam pelaksanaan pembangunan ada beberapa hal yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi dalam proses pembangunan. Menurut Riyadi dan Deddy Supriadi Bratakusumah (2008:15-39), dalam proses pembangunan ada lima dimensi yang perlu diperhatikan sebagai berikut :

1. Faktor Lingkungan
2. Sosial
3. Budaya
4. Ekonomi
5. Politik
6. Faktor Perencanaan Sumber Daya Manusia ;
7. Faktor Sistem yang digunakan atau strategi;
8. Faktor perkembangan ilmu dan teknologi;
9. Faktor pendanaan
10. *Pembangunan Manusia*

Berbicara pembangunan manusia, Zulkarimen (1998:64) menyebutkan bahwa sesungguhnya yang hendak dibangun adalah manusia. Karena itu hasil ataupun manfaat pembangunan harus pada manusianya. Sedangkan hal yang lain merupakan alat untuk tercapinya tujuan, yaitu kemanfaat manusia. Dari sinilah berasal istilah *human development* atau pembangunan manusia yang diartikan sebagai memperbesar pilihan-pilihan yang tersedia bagi manusia.

Pembangunan manusia memiliki dua sisi yaitu :

1. Pembentukan kemampuan-kemapuan manusia (*human capabilities*) seperti peningkatan kesehatan, penegetahuan dan keterampilan; dan
2. Penggunaan dari kemampuan yang telah diperoleh itu untuk bersenang-senang, keperluan produktif, atau untuk aktif dalam urusan budaya sosial dan politik.
3. *Pembangunan Infrastruktur*

Grigg dalam Robert J Kodoatie (2005:8) infrastrusktur merujuk pada sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan - bangunan gedung dan fasilitas publik yang lain, yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial ekonomi.

Sistem infrastruktur merupakan pendukung utama fungsi-fungsi sistem sosial dan sistem ekonomi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Sistem infrastruktur dapat didefinisikan sebagai fasilitas-fasilitas atau struktur-struktur dasar, peralatan-peralatan, instalasi-instalasi yang dibangun dan dibutuhkan untuk berfungsinya sistem sosial dan sistem ekonomi masyaraka. Definisi teknik juga memberikan spesifikasi apa yang dilakukan sistem infrastruktur dan mengatakan bahwa infrastruktur adalah aset fisik yang dirancang dalam sistem sehingga memberikan pelayanan publik yang penting.

1. Strategi Pembangunan

Selanjutnya menurut Siagian (2005:81) tidak ada satupun srategi pembangunan yang cocok digunakan oleh negara berkembang yang ingin meningkatkan kesejahteraan materil para warganya hal ini sebabkan oleh adanya beberapa faktor yang mempengaruhi, yaitu :

1. Jumlah Penduduk;
2. Tingkat pendidikan masyarakat;
3. Luasnya wilayah kekuasaan negara;
4. Topografi wilayah kekuasaan negara;
5. Jenis dan jumlah kekayaan negara yang dimiliki;
6. Sistem politik yang berlaku di negara bersangkutan;
7. Persepsi para pengambil keputusan tentang prioritas pembangunan yang berkaitan dengan sifat keterbelakangan yang dihadapi oleh masyarakat.
8. **METODE PENELITIAN**

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Deskriptif Kualitatif. Selanjutnya Menurut Moleong ( 2006 : 2 ) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang bersifat ilmiah, yang bergantung pada suatu pengamatan pada manusia dalam kawannya sendiri yang berhubungan dengan orang – orang, latar dan perilaku secara holistik ( utuh ).

Adapun fokus penelitian yang ditetapkan mengacu kepada perumusan masalah dan tujuan penelitian meliputi Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan desa di desa BangunRejo Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara terfokus pada :

1. Program pemberdayaan masyarakat di desa BangunRejo dalam pembangunan di bidang fisik :
2. Pembangunan Sarana dan Prasarana Dasar
3. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kesehatan.
4. Program pemberdayaan masyarakat di desa BangunRejo dalam pembangunan di bidang non fisik :
5. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan;
6. Pemberdayaan Lembaga Sosial;
7. Pengembangan Sentra Perekonomian desa
8. **HASIL PENELITIAN**

**Program pemberdayaan masyarakat di desa Bangun Rejo dalam pembangunan di bidang fisik**

***Pembangunan Sarana dan Prasarana Transportasi***

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. Dengan kata lain sarana lebih ditujukan untuk benda – benda atau peralatan seperti komputer, meja, kursi dan lain – lain.

Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses. Adapun proses tersebut dapat berupa suatu usaha, pembangunan, ataupun proyek.

Pembangunan sarana dan prasarana memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung aktivitas ekonomi, sosial, budaya, serta kesatuan dan persatuan bangsa terutama sebagai modal dasar dalam memfasilitasi interaksi dan komunikasi di antara kelompok masyarakat serta mengikat dan menghubungkan antarwilayah. Pembangunan sarana dan prasarana, yang menjadi kesatuan dari pembangunan nasional, diharapkan dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan perekonomian nasional dan mendukung daya saing nasional secara global.

Apakah program pemberdayaan masyarakat di Desa Bangunrejo dalam pembangunan sarana dan prasarana transportasi sudah berjalan dengan maksimal. Hasil wawancara penulis bersama Bapak Siman selaku Kepala Desa Bangunrejo, beliau mengatakan bahwa :

“program pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang kami jalankan di desa bangunrejo ini hanya sebatas pengadaan proyek untuk pembangunan atau perbaikan jalan seperti semenisasi, saya akan terus memantau jalannya proses pembangunan dengan begitu hasil sumber daya alam yang ada di desa bangunrejo bisa terealisasi ke kabupaten kota”(wawancara, 03 Oktober 2016)

Pada hari yang sama telah dilakukan wawancara penulis dengan Bapak Ahmad Yunus selaku Sekretaris, beliau mengatakan bahwa:

”pembangunan sarana dan prasarana untuk sarana trasnportasi sudah berjalan dengan maksimal karena untuk proses pembangunan semenisasi tidak memakan waktu lama jadi memudahkan kami dalam proses pembangunan”(wawancara,03 Oktober 2016)

Wawancara juga dipaparkan oleh Ibu Lilik Khalimatus.S S.HI selaku Bendahara. Beliau mengatakan bahwa :

“untuk pembangunan sarana transportasi sudah berjalan dengan baik dan juga proses semenisasi lebih cepat hal ini juga sangat berpengaruh pada aktifitas masyarakat, apabila proses dilakukan lambat itu akan menghambat proses ekspor sumber daya alam di kabupaten kota”(wawancara, 03 Oktober 2016).

Dari uraian wawancara yang penulis lakukan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa program sarana dan prasarana transportasi di desa bangunrejo berjalan dengan baik dan cepat hal ini juga mendukung berjalannya proses ekspor hasil sumber daya alam yang ada ke kabupaten kota ini menunjukan bahwa program berjalan dengan maksimal.

***Pembangunan Sarana dan Prasarana Kesehatan***

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. Dengan kata lain sarana lebih ditujukan untuk benda – benda atau peralatan seperti komputer, meja, kursi dan lain – lain.

Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses. Adapun proses tersebut dapat berupa suatu usaha, pembangunan, ataupun proyek.

Pembangunan kesehatan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah baik Provinsi dan atau Kabupaten/Kota, masyarakat serta dunia usaha dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Apakah program pemberdayaan masyarakat di Desa Bangunrejo dalam pembangunan sarana dan prasarana kesehatan sudah berjalan dengan maksimal. Hasil wawancara penulis bersama Bapak Siman selaku Kepala Desa Bangunrejo, beliau mengatakan bahwa :

”Program pembangunan sarana dan prasarana kesehatan untuk saat ini kami mempunyai sembilan posyandu dan satu puskemas pembantu untuk melayani masyarakat dan kami akan terus meningkatkan pembangunan di bidang kesehatan di desa bangunrejo juga memberikan pelayanan yang maksimal pada masyarakat”(wawancara,03 Oktober 2016)

dilakukan wawancara penulis dengan Bapak Ahmad Yunus selaku Sekretaris, beliau mengatakan bahwa:

“sarana dan prasarana kesehatan disini (desa bangunrejo) cukup baik walaupun puskesmas induk belum ada tetapi adanya puskesmas pembantu dan posyandu yang ada sudah cukup membantu masyarakat yang ingin konsultasi mengenai kesehatan, kami akan tetap mengusahakan puskesmas induk agar pembangunan di desa bangunrejo merata salah satunya tentang kesehatan”(wawancara,03 Oktober 2016)

Wawancara juga dipaparkan oleh Ibu Lilik Khalimatus.S S.HI selaku Bendahara. Beliau mengatakan bahwa :

“ menurut saya sarana dan prasarana kesehatan yang ada di ruang lingkup desa saat ini cukup maksimal walaupun kami tahu puskesmas induk belum ada tetapi dengan adanya puskesmas pembantu dan posyandu sangat membantu dalam menangani kesehatan masyarakat”(Wawancara, 03 Okrober 2016)

Dari uraian wawancara yang penulis lakukan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa program sarana dan prasarana kesehatan di desa bangunrejo berjalan dengan maksimal dengan adanya puskesmas pembantu dan sembilan posyandu yang aktif dalam menangani kesehatan masyarakat desa bangunrejo.

**Program pemberdayaan masyarakat di desa Bangun Rejo dalam pembangunan di bidang non fisik**

***Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan***

Pemberdayaan masyarakat mengandung pengertian yaitu sebagai proses pembelajaran partisipatif baik secara individu maupun kelompok guna menggerakkan, dan mengembangkan daya serta meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat , untuk berbuat bagi dirinya sendiri secara swadaya . Yang mencakup upaya peningkatan kondisi sosial, ekonomi maupun kualitas hidup masyarakat . Bahwa pemberdayaan masyarakat dilaksanakan melalui program-program dan kegiatan konkrit yang bertumpu pada potensi lokal/daerah, budaya dan tingkat pengetahuan masyarakat serta memperhatikan kompleksitas permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat . Sehingga program pemberdayaan masyarakat tersebut tepat sasaran, berdayaguna dan berhasilguna .

Apakah program pemberdayaan masyarakat di Desa Bangunrejo untuk pembangunan sarana dan prasarana dalam pemberdayaan lembaga masyarakat sudah berjalan dengan maksimal. Hasil wawancara penulis bersama Bapak Siman selaku Kepala Desa Bangunrejo, beliau mengatakan bahwa :

“ untuk lembaga masyarakat sendiri sudah berjalan dengan baik seperti lembaga pemberdayaan masyarakat desa, pkk, karang taruna dan selalu menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dan kami akan terus menggerakan masyarakat dalam melaksanakan dan mengendalikan pembangunan di desa bangunrejo” (wawancara, 03 Oktober 2016)

dilakukan wawancara penulis dengan Bapak Ahmad Yunus selaku Sekretaris, beliau mengatakan bahwa:

” pemberdayaan lembaga kemasyarakatan ini sudah berjalan dengan baik hal ini sudah berjalan cukup lama dengan adanya lembaga masyarakat akan menjadi mudah bagi kami pihak desa melakukan prses pembanguna karena akan meningkatkan kualitas dan percepatan pelayanan kepada masyarakat” (wawancara,03 oktober 2016)

Wawancara juga dipaparkan oleh Ibu Lilik Khalimatus.S S.HI selaku Bendahara. Beliau mengatakan bahwa :

“ lembaga kemasyarakatan di desa bangunrejo menurut saya sudah terbina dengan baik seperti pk-pkk, karang taruna sangat membantu dalam proses jalannya proses pembangunan dalam menggerakan masyarakat untuk berpartisipasi dengan proses jalannya pembangunan”(wawancara, 03 Oktober 2016)

Dari uraian wawancara yang penulis lakukan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa lembaga masyarakat sangat brjalan dengan baik dan sangat membantu jalannya proses pembangunan di desa bangunrejo.

***Pemberdayaan Lembaga Sosial***

Lembaga Sosial adalah kompleks norma – norma atau kebiasaan – kebiasaan untuk mempertahankan nilai – nilai yang dipandang sangat penting dalam masyarakat.

Apakah program pemberdayaan masyarakat di Desa Bangunrejo untuk pembangunan sarana dan prasarana dalam pemberdayaan lembaga sosial sudah berjalan dengan maksimal. Hasil wawancara penulis bersama Bapak Siman selaku Kepala Desa Bangunrejo, beliau mengatakan bahwa :

“lembaga - lembaga sosial yang ada akan terus di berdayakan untuk meningkatkan kualitas masyarakat dalam menunjang pembangunan di desa bangunrejo”(wawancara,03 Oktober 2016)

dilakukan wawancara penulis dengan Bapak Ahmad Yunus selaku Sekretaris, beliau mengatakan bahwa:

“Lembaga sosial adalah salah satu penunjang dalam proses pembangunan, dengan tertatanya masyarakat suatu pembangunan akan tersealisasi dengan baik jadi lembaga sosial dan instansi harus terus berkerja sama dalam melakukan pembangunan di desa bangunrejo ”(wawancara,03 Oktober 2016)

Wawancara juga dipaparkan oleh Ibu Lilik Khalimatus.S S.HI selaku Bendahara. Beliau mengatakan bahwa :

“ menurut saya lembaga sosial di desa bangunrejo sudah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik selalu memelihara ketertiban dalam bermasyarakat”(wawancara 03 Oktober 2016)

Dari uraian wawancara yang penulis lakukan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa lembaga sosial sudah maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya didalam tatanan masyarakat untuk mengontrol proses pembangunan di desa bangunrejo.

***Pengembangan Sentra Perekonomian Desa***

Selaras dengan visi pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, maka visi Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia adalah “Mewujudkan Masyarakat Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur.

Apakah program pemberdayaan masyarakat di Desa Bangunrejo untuk pembangunan sarana dan prasarana dalam pengembangan sentra perekonomian desa sudah berjalan dengan maksimal. Hasil wawancara penulis bersama Bapak Siman selaku Kepala Desa Bangunrejo, beliau mengatakan bahwa :

“di desa bangunrejo memang wilayah yang strategis dalam bidang pertanian dan kami akan terus mendorong kelompok tani untuk berkembang dalam mewujudkan pembangunan pedesaan berbasis pertanian dan mendorong desentralisasi pembangunan infrastruktur setara kota di wilayah pedesaan”. (wawancara, 03 Oktober 2016)

dilakukan wawancara penulis dengan Bapak Ahmad Yunus selaku Sekretaris, beliau mengatakan bahwa:

“ desa bangunrejo adalah salah satu wilayah pertanian di kecamatan tenggarong seberang dan selalu mengahasilkan hasil - hasil pertanian untuk kemajuan bidang industri”wawancara( 03.Oktober 2016)

Wawancara juga dipaparkan oleh Ibu Lilik Khalimatus.S S.HI selaku Bendahara. Beliau mengatakan bahwa :

“Pengembangan kelembagaan kelompok petani sangat dibutuhkan untuk pemberdayaan petani untuk dapat berkembang secara mandiri sebagai kunci dalam mewujudkan strategi pembangunan pedesaan”(wawacara 03 Oktober 2016)

Dari uraian wawancara yang penulis lakukan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengembangan sentra perekonomian desa sudah berjalan dengan baik dan kelembagaan kelompok tani di dukung sepenuhnya oleh instansi pemerintahan desa.

dilakukan wawancara penulis dengan Bapak Ahmat selaku masyarakat Desa Bangunrejo :

untuk pembangunan di disini sudah lumayan cepat seperti semenisasi dan pondasi badan jalan, jembatan dan lain-lain merupakan hal yang diperioritaskan oleh pemerintah desa untuk memudahkan masyarakat dalam beraktivitas. (wawancara 18 Desember 2016)

Wawancara juga dilakukan penulis dengan Ibu Hamidah selaku masyarakat Desa Bangunrejo :

Menurut saya pembangunan di desa ini sudah bagus yang penting itu jalanan harus bagus karena kalo jalan banyak rusak seperti jalan berlubang sering terjadi kecelakaan disini. Kami petani juga sudah mulai diperhatikan oleh desa sering dibantu juga untuk alat-alat tani. (wawancara 18 Desember 2016)

Wawancara juga dilakukan penulis dengan Bapak Agunawan selaku masyarakat Desa Bangunrejo :

sekarang sudah banyak pembangunan di desa bangunrejo seperti perbaikan gorong -gorong, semenisasi, pengembangan wilayah parit dan pembangunan jembatan hal ini sangat membantu sekali untuk masyarakat, pelayanan kesehatan juga sudah efektif hanya saja puskesmas induk belum ada dan semoga puskesmas induk cepat di bangun agar pelayanan kesehatan untuk masyarakat lebih efektif. (wawancara 18 Desember 2016)

**Pembahasan**

**Program pemberdayaan masyarakat di desa Bangun Rejo dalam pembangunan di bidang fisik**

***Pembangunan Sarana dan Prasarana transportasi***

Pembangunan sarana dan prasarana memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung aktivitas ekonomi, sosial, budaya, serta kesatuan dan persatuan bangsa terutama sebagai modal dasar dalam memfasilitasi interaksi dan komunikasi di antara kelompok masyarakat serta mengikat dan menghubungkan antarwilayah. Pembangunan sarana dan prasarana, yang menjadi kesatuan dari pembangunan nasional, diharapkan dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan perekonomian nasional dan mendukung daya saing nasional secara global.

Dalam hal ini lebih ditujukan dalam pembangunan jalan seperti semenisasi agar masyarakat lebih mudah melakukan aktifitas dalam bidang pertanian seperti mengekspor hasil pertanian ke kabupaten/kota.

***Pembangunan Sarana dan Prasarana Kesehatan***

Pembangunan kesehatan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah baik Provinsi dan atau Kabupaten/Kota, masyarakat serta dunia usaha dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

Perkembangan pembangunan kesehatan di desa bangunrejo dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan menyeluruh yang dekat dengan masyarakat.

**Tabel Kondisi Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan**

**Desa Bangunrejo**

| No | Sarana/Prasarana | Jumlah | Kondisi | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Baik | Sedang | Rusak |
| 1 | Puskesmas pembantu | 1 | 1 | - | - |
| 2 | Posyandu | 9 | 9 |  |  |

*Sumber data : Arsip kantor Desa Bangunrejo*

**Program pemberdayaan masyarakat di desa Bangun Rejo dalam Pembangunan di Bidang Non Fisik**

***Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan***

Pemberdayaan masyarakat sebagai proses pembelajaran partisipatif baik secara individu maupun kelompok guna menggerakkan, dan mengembangkan daya serta meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat , untuk berbuat bagi dirinya sendiri secara swadaya . Yang mencakup upaya peningkatan kondisi sosial, ekonomi maupun kualitas hidup masyarakat . Bahwa pemberdayaan masyarakat dilaksanakan melalui program - program dan kegiatan konkrit yang bertumpu pada potensi lokal/daerah, budaya dan tingkat pengetahuan masyarakat serta memperhatikan kompleksitas permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat . Sehingga program pemberdayaan masyarakat tersebut tepat sasaran, berdayaguna dan berhasilguna dan ingin terus memberdayakan lembaga – lembaga sosial seperti pk-pkk, karang taruna dan lain sebagai nya agar terciptanya tatanan masyarakat yang berkualitas.

***Pemberdayaan Lembaga Sosial***

Untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai dengan kemampuan memikirkan, memutuskan sertamelakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya/kemampuan yang dimiliki untuk meningkatkan kualitas masyarakat dalam menunjang pembangunan Desa Bangunrejo.

***Pengembangan Sentra Perekonomian Desa***

Selaras dengan visi pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, maka visi Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia adalah “Mewujudkan Masyarakat Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur.

Pembangunan dalam bidang perekonomian di desa bangunrejo akan mendorong investasi di wilayah pedesaan dengan demikian diharapkan akan mampu menciptakan pemerintahan di daerah yang mandiri dan otonom.

1. **PENUTUP**

**Kesimpulan**

Sesuai hasil analisis data dan pembahasan sebagaimana yang dikemukakan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Berjalannya program pemberdayaan masyarakat dalam bidang fisik untuk sarana dan prasarana transportasi dalam hal ini pembangunan yang dilakukan yaitu perbaikan jalan agar terealisasinya hasil pertanian ke kabupaten/kota.
2. Dalam bidang kesehatan desa bangunrejo sudah mempunyai satu puskesmas pembantu dan Sembilan posyandu aktif untuk melayani masyarakat di bidang kesehatan. Dan desa bangunrejo akan terus mengembangka pelayanan kesehatan di wilayahnya.
3. untuk lembaga masyarakat sendiri sudah berjalan dengan baik seperti lembaga pemberdayaan masyarakat desa, pkk, karang taruna, kelompok tani, adat dan lain sebagainya dan selalu menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dan agar terciptanya tatanan masyarakat yang sejahtera.

**Saran-saran**

Adapun saran-saran yang akan penulis kemukakan adalah sebagai berikut :

1. Untuk sarana dan prasarana bidang kesehatan agar lebih ditingkatkan lagi di desa bangunrejo seperti puskesmas induk agar lebih memudahkan masyarakat dalam pelayanan kesehatan.
2. Dan perbaikan jalan dengan semenisasi harus terus di lanjutkan karena ada sedikit jalan yang berlubang yang belum di semenisasi hal-hal seperti ini akan menyusahkan masyarakat apabila jalan yang berlubang tidak di lanjutkan semenisasi.

**DAFTAR PUSTAKA**

Adger*,* D*. 2003. Core syintax.* Oxford, UK: Oxford Univercity Prees.

Adisasmita, Raharjo, 2006. Membangun Desa Partisipatif Yogyakarta: Graha Ilmu.

Gomes, Faustino Cardoso, 2003, Manajemen Sumber Daya Manusia, Penerbit Andi, Yogyakarta.

Katasasmita, Ginanjar, 1996. Pembangunan Untuk Rakyat. Jakarta: PT. Pustaka Lisdesindo.

Kodoatie, Robert J. 2005. *Pengantar Manajemen Infrastruktur*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Koenjaraningrat. (2012) *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakartan: Rineka Cipta.

Mathis Robert L. dan Jackson Jhon H. 2006, *Human Resource Management*, alih bahasa. Salemba Empat. Jakarta.

Moleong, J. 2000, Metodelogi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rondakarya

Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah.* Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama

Siagian, Sondang. P. 2005. Administrasi Pembangunan Bumi Aksara. Jakarta.

Soetomo. 2011. Pemberdayaan Masyarakat. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Suharto, Edi. 2005, Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat. Bandung: PT. Refika Aditama.

Suhendra, 2006. Peranan Birokrasi dalam Pemberdayaan masyarakat. Bandung: ALFABETA

Sulistyani, Ambar T& Rosidah. 2003. Manajemen Sumber Daya Manusia : Konsep, Teori dan Pembangunan dalam Konteks Organisasi Publik. Yogyakarta : Graha Ilmu.

Widodo, Wahyu. 2015. *Model Pemberdayaan Kelembagaan Dalam Implementasi* *Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Kewengen Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang.* Jurnal Imilah CIVIS Volume VNO. 2. Di donwload dari e-jurnal.upgrismg.ac.id pada tanggal 29 Maret 2016 pukul 21.00 WIB.

1. Alumni Fisipol Untag 1945 Samarinda [↑](#footnote-ref-1)